

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada sebuah perusahaan, keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang proses berjalannya suatu perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan dan menilai kinerja perusahaan, dimana proses keluar masuknya uang di kelola oleh bagian keuangan. Perusahaan memenuhi kebutuhannya dengan melakukan berbagai proses, baik dalam hal pembelian barang untuk kebutuhan kerja maupun membayar biaya-biaya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, dari hal tersebut maka dapat dipastikan adanya proses penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan.

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Semakin besar perusahaan semakin penting pula arti dari pengendalian intern dalam perusahaan. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai pencapaian tujuan 3 golongan berikut ini : keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas merupakan suatu mekanisme pengendalian perusahaan dan alat yang efektif untuk menyediakan

laporan serta bermanfaat dalam memprediksikan konsekuensi yang mungkin muncul dari berbagai pilihan aktivitas dan tindakan yang memungkinkan untuk dilakukan. Sistem Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas yang baik akan menghasilkan data laporan keuangan yang baik pula, oleh karena itu pihak perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran kas yang mereka gunakan agar yang sudah mereka pakai selama ini dapat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi perusahaan.

Sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas akan sangat membantu perusahaan memberi informasi penting dalam pengambilan keputusan dan mengadakan ramalan tentang masa depan perusahaan serta kebijaksanaan perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kas. Dengan menerapkan sistem akuntansi yang baik dan tepat pada perusahaan maka dapat memperbaiki mutu informasi yang akan disajikan, meminimalkan biaya dan pengendalian intern yang ada di dalam perusahaan. Salah satu sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan adalah sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem ini menangani aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, penerimaan dan pengeluaran kas harus dilaksanakan secara efektif agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Masalah kas adalah masalah yang kompleks karena merupakan aset yang paling mudah diselewangkan, sehingga diperlukan penyusunan suatu sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang baik. Upaya menjamin transaksi yang sehubungan dengan kas harus dilakukan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan kas tersebut. Untuk menjaga keamanan dari

kas itu sendiri haruslah ada suatu kegiatan pengecekan dan pemeriksaan mendadak terhadap nilai fisik dari kas itu dengan maksud untuk menjaga keberadaan kas itu.

PT. Jasa Raharja adalah perusahaan asuransi yang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Kehadiran PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. PT Jasa Raharja yang seratus persen kepemilikannya dimiliki oleh negara membawa tanggung jawab besar untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, menjadi perusahaan yang bersih dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan merupakan perusahaan yang bertanggungjawab dibidang asuransi kecelakaan yang berada di Kota Medan.

Saat ini untuk setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan sudah menggunakan pembayaran secara transfer untuk semua proses kegiatan di kantor tersebut, baik untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dengan nominal kecil ataupun besar yang menyebabkan tidak tersedianya kas kecil di perusahaan tersebut. Penyediaan dana kas kecil bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi pembayaran atas pengeluaran yang bersifat rutin dengan jumlah kecil, dan tidak efektif dibayar dengan melakukan transfer. Karena dengan adanya dana kas kecil ini tidak dimungkiri, kalau disetia divisi perusahaan terkadang membutuhkan dana yang harus dipersiapkan dengan cepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja Perwakilan Medan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diuji pada penelitian ini adalah : Bagaimana sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan ?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan.

1.4 Manfaat Masalah

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut ini:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan kedalam

praktik mengenai sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan untuk pengelolaan penerimaan kas dan pengeluaran kas sehingga menghasilkan pengelolaan prosedur yang lebih baik.

3. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan menjadi bahan masukan dalam mengatasi permasalahan sejenis.

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Intern

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Untuk menjalankan suatu kegiatan, terlebih pada organisasi dengan cakupan yang besar, dibutuhkan sistem untuk menilai kemajuan dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian-bagian yang terkait dalam terlaksannya kegiatan diorganisasi tersebut. Menurut Mei H. M Munte mengemukakan bahwa sistem merupakan **“sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*common purpose*) dapat dicapai”**.¹

Sedangkan Menurut Mulyadi:

“Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat dan berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi”.²

Dalam suatu organisasi terdapat kegiatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Tujuan akan dapat tercapai dengan efektif dan efisien apabila kegiatan sekelompok orang itu dilakukan dengan sistematis. Dari pengertian di

¹ Mei Hotma Mariati Munte, **Sistem Informasi Akuntansi**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal.1

² Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetaklan Kedua : Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal. 23

atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian sistem adalah suatu jaringan prosedur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama.

Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi mengemukakan bahwa

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.³

Menurut Krismiaji dalam Ribka Tinangon menyatakan

“Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya manajemen”.⁴

Sedangkan Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh Oloan Simanjuntak dll., adalah:

“Pengendalian intern (*Internal Control*) meliputi semua perencanaan dari suatu organisasi semua metode serta prosedur yang ditetapkan oleh manajemen dalam rangka untuk menjaga harta perusahaan dan pencurian oleh karyawan, perampokan, serta penggunaan yang tidak diotorisasi dan meningkatkan akuntansi dan kepercayaan dari catatan akuntansi dengan cara mengurangi risiko kesalahan dan iregulasi dalam proses akuntansi yang dilakukan”.⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan kumpulan-kumpulan dari bagian-bagian yang tidak terpisah yang dijalankan oleh semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga tujuan akhir yang ditetapkan bersama berjalan secara efektif dan efisien. Dari pengertian defenisi diatas maka Sistem pengendalian intern kegiatan perusahaan dalam mengadakan

³ **Ibid**, hal.129

⁴ Ribka Tinangon, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penggajian pada Grand Sentral Supermarket Tomohon** : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015, hal 64-65

⁵ Oloan Simanjuntak.,dll., **Pengantar Akuntansi**, Materi Kuliah: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal.1

pengawasan terhadap struktur organisasi, prosedur-prosedur keuangan dan pencatatan-pencatatan guna mendapatkan kecermatan dan ketelitian pada data akuntansi, mekanisme yang digunakan untuk mengamankan, mencegah pemborosan penyalahgunaan kas, menjamin ketelitian, mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen kas.

Sistem pengendalian intern juga merupakan salah satu cara untuk menjaga agar dana kas perusahaan tidak diselewengkan. Meskipun penyelewengan itu tidak mungkin untuk dihilangkan tetapi dengan pengendalian intern kas penyelewengan ini dapat dihindari.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian Intern dilaksanakan dengan tujuan membantu manajemen agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem pengendalian intern yang baik dirancang untuk melindungi aset perusahaan dengan menghindari kesalahan dan kecurangan serta meningkatkan produktivitas seluruh anggota organisasi.

Menurut Mulyadi, tujuan sistem pengendalian intern dilihat dari definisi sistem pengendalian intern adalah:

- 1. Menjaga Kekayaan Organisasi**
- 2. Mengecek Ketelitian dan keandalan data akuntansi**
- 3. Mendorong efisiensi**
- 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen⁶**

Berikut ini akan dijelaskan lebih luas masing-masing elemen dari tujuan pengendalian intern yang akan dikemukakan diatas yaitu:

⁶ Mulyadi, **Op. Cit.**, hal. 131

1. Menjaga Aset Organisasi

Harta organisasi dapat dilindungi melalui dua cara yaitu pengendalian struktur organisasi dan pengendalian fisik. Pengawasan melalui struktur organisasi yaitu dengan membuat suatu pembagian tugas atas fungsi yang jelas dan untuk masing-masing bagian. Dengan adanya struktur organisasi ini akan terlihat dengan jelas bahwa wewenang serta tanggungjawab dari setiap bagian yang ada pada struktur organisasi. Sedangkan pengawasan secara fisik yaitu mengadakan pengadaan secara fisik atau dengan mempergunakan alat-alat seperti gudang yang terkunci, lemari besi dan lain-lain.

2. Mengecek Ketelitian dan Kebenaran Data Akuntansi

Manajemen memerlukan informasi yang teliti, dapat dipercaya kebenarannya dan tepat pada waktunya untuk mengelola kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Terdapat banyak tipe dan jenis informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan penting yang menyangkut bagian-bagian dalam perusahaan.

3. Mendorong Efisiensi dalam Operasi

Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikorbankan dengan hasil yang dicapai dengan pengorbanan yang dilakukan. Maka untuk memajukan efisiensi operasi, bagian-bagian operasi perusahaan dalam menjalankan kegiatannya selalu memberikan pengorbanan untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Pimpinan suatu organisasi bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan sebaik-baiknya. Bertanggungjawab bukan berarti harus

melaksanakan sendiri, akan tetapi dapat menunjuk orang yang tepat untuk mengerjakan sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya pengendalian yang baik maka setiap bagian dalam organisasi akan melakukan tugasnya masing-masing dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam perusahaan.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern

Dengan melihat tujuan pengendalian intern, agar pengendalian dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu adanya prinsip-prinsip pengendalian intern. Prinsip pengendalian intern kas terutama didasarkan pada pemisahan tanggungjawab dan wewenang fungsional oleh para pegawai, maka sering orang mengira bahwa prinsip tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan yang kecil yang mempunyai pegawai yang jumlah terbatas.

Prinsip pengendalian intern yang diterapkan pada suatu perusahaan dengan perusahaan lain adalah berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti operasi dan besarnya perusahaan. Menurut Oloan Simanjuntak dll., dalam menerapkan pengendalian intern yang baik harus meliputi prinsip-prinsip pengendalian intern antara lain sebagai berikut:

- 1. Dibentuk Pertanggungjawaban**
- 2. Pembagian Tugas harus Jelas**
- 3. Prosedur Dokumentasi Harus Ada**
- 4. Pengendalian secara Fisik, Mekanik, dan Elektronik Harus Ada**
- 5. Verifikasi Internal yang Independen Harus Ada⁷**

Berikut ini akan dijelaskan lebih luas masing-masing elemen dari prinsip-prinsip pengendalian intern di atas:

1. Dibentuk Pertanggungjawaban

⁷ Oloan Simanjuntak dll., **Op. Cit.**, hal.1

Pengendalian akan efektif jika hanya satu orang yang bertanggungjawab atas tugas yang diberikan. Pembentukan pertanggungjawaban meliputi otorisasi dan persetujuan atas suatu transaksi.

2. Pembagian Tugas Harus Jelas

Ada dua prinsip umum yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Tanggung jawab atas pekerjaan harus diberikan kepada individu yang berbeda.
- b. Tanggung jawab untuk memelihara pencatatan harus terpisah dengan tanggung jawab untuk menjaga fisik aset

3. Prosedur Dokumentasi Harus Ada

Dokumen sebagai bukti transaksi harus memenuhi syarat dalam prosedur dokumentasi. Ada beberapa prinsip dalam dokumentasi yaitu:

- a. Semua dokumen harus diberi nama terlebih dahulu (*Prenumbered*) yang tercetak serta semua dokumen harus dipertanggungjawab dan
- b. Dokumen sebagai bukti pencatatan akuntansi (*Journal*) disampaikan ke bagian akuntansi untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat tepat waktu.

4. Pengendalian secara Fisik, Mekanik, dan Elektronik Harus Ada

Pengendalian ini sangat penting karena akan meningkatkan akuntansi dokumentasi.

5. Verifikasi Internal yang Independen Harus Ada

Guna menciptakan pengendalian yang efektif perlu dibentuk bagian verifikasi yang bertugas me-review, merelokasi, serta menjaga pengendalian internal agar lebih efektif.

2.1.4 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian intern merupakan bagian-bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian intern yang cukup memadai sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Adapun unsur-unsur pokok dari pengendalian intern menurut Mulyadi adalah sebagai berikut:

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
- 2. Wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan dan beban.**
- 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.**
- 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.⁸**

Berikut ini diuraikan secara rinci setiap unsur pokok pengendalian intern diatas yaitu:

1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

⁸ Mulyadi, *Loc. Cit*

2. Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Aset, Utang, Pendapatan dan Beban.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi

Dalam organisasi, perlu dirancang berbagai metode untuk merekayasa praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah: (1) penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung-jawabkan oleh yang berwenang, (2) pemeriksaan mendadak (surprised audit), (3) setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi orang lain, (4) perputaran jabatan, (5) keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, (6) secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya, (7) pemebentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya.

Untuk menciptakan pengendalian intern dalam perusahaan, perlu diperoleh mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan

karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: (1) seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya, (2) pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan pengembangan pekerjaannya.

2.2 Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Unsur-unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas menurut Mulyadi :

a. Organisasi

- 1) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas.
- 2) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
- 3) Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengeriman dan fungsi akuntansi.

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

1. Penerimaan orderan dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.
2. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita regiter kas pada faktur tersebut.
3. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbitan kartu kredit.
4. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan dengan membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai.

5. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

c. Praktik yang Sehat

1. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan
2. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau haru kerja berikutnya.
3. Perhitungan saldo kas yang ada ditangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksaan intern.⁹

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya

2.3 Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi dalam Nurwahyuni, terdapat beberapa unsur pengendalian intern pada sistem pengeluaran kas, diantaranya:

a. Organisasi

1. Fungsi penyimpanan harus terpisah dari fungsi akuntansi.
2. Transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh Bagian Kasa sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain.

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

1. Pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang.

⁹ Ibid, hal. 433

2. Pembukuan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
3. Pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas (atau dalam metode pencatatan tertentu daalam register cek) harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

c. Praktik yang Sehat

1. Saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya.
2. Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap “lunas” oleh Bagian Kasa setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan.
3. Penggunaan rekening koran bank (*Bank Statement*), yang merupakan informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas.
4. Semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan penerimaan pembayaran atau dengan pemindahan bukuan.
5. Jika pengeluaran kas dalam jumlah yang kecil, pengeluaran ini dilakukan melalui dana kas kecil, yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan *imperest system*.
6. Secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ad ditangan dengan jumlah kas menurut catatan.

7. Kas yang ada ditangan (*cash in safe*) dan kas yang ada dalam perjalanan (*cash in transit*) diasuransikan dari kerugian.
8. Kasir diasuransikan (*fidelity bond insurance*).
9. Kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada ditangan (misalnya dengan mesin register kas, almari besi, dan *strong room*).
10. Semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh Bagian Kasa.¹⁰

d. Karyawan yang mutunya sesudah dengan tanggungjawabnya

2.4 Asuransi

2.4.1 Pengertian Asuransi

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari risiko, baik menyangkut jiwa maupun harta benda. Munculnya risiko mengenai bentuk dan kapan risiko itu terjadi tidak dapat diduga sebelumnya. Risiko yang muncul seseorang bisa menghindarinya, menghadapinya, mengalikan, maupun membagi terhadap orang lain atau lembaga lain. Konsep pengalihan risiko (*risk transferring*) dan pembagian risiko (*risk sharing*) inilah yang melahirkan lembaga pertanggungan atau yang lebih dikenal dengan asuransi. Dalam konteks Indonesia mengenai lembaga pertanggungan asuransi sudah diatur sejak sebelum kemerdekaan yaitu dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau yang lebih kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

¹⁰ Nurwahyuni, *Analisis Pengendalian Intern atas Prosedur Pengeluaran Kas pada PT. Pilar Putra Teknik Palembang* : Politeknik Negeri Sriwijaya. 2016, hal 20

Mengenai definisi asuransi terdapat dalam KUHD yaitu pada bab 9 tentang asuransi atau pertanggungan pasal 246 berbunyi

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan atau yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”¹¹

Definisi mengenai asuransi juga diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang menyebutkan bahwa

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung”¹².

2.4.2 Tujuan Asuransi

Asuransi dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi merupakan suatu lembaga keuangan. Sebab, melalui asuransi dapat menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berakumulasi dengan besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Selain itu, asuransi bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi serta yang bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga

¹¹ Khotibul Umam. **Memahami & Memilih Produk Asuransi**, cetakan 1, Medpress Digital, Yogyakarta. 2013, hal 3

¹² **Ibid**, hal 3

sebelumnya. Berdasarkan prinsip keseimbangan dengan asuransi bertujuan untuk mengembalikan posisi keuangan seseorang tertanggung pada keadaan semula. Dengan demikian, tujuan asuransi adalah memberikan perlindungan nilai ekonomi kepada seseorang terhadap berbagai resiko kehidupan.

Menurut Tuti Rastuti, apabila diuraikan lebih detail tujuan asuransi antara lain :

1. **Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. Misalnya, apabila tertanggung menderita kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan. Namun tertanggung telah manajemen resiko tersebut dengan asuransi, maka ganti rugi akan diberikan oleh penanggung untuk mengatasi resiko tersebut yang bertujuan untuk mengatasi kerugian finansial tertanggung akibat kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan atau bahkan kemungkinan kebangkrutan, sehingga tertanggung masih mampu melakukan aktivitas seperti sebelum menderita kerugian. Perusahaan akan memperoleh rasa tenang dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya serta dapat mendorong keberaniannya menggiatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang besar pula sebab resiko yang lebih besar telah diambil ahli oleh penanggung. Pihak bank memiliki resiko misalnya kerugian dibawa kaburnya uang nasabah, resiko, kredit macet, resiko kecurian, resiko kebakaran, dan sebagainya. Memberikan kredit memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Menutup *Loss of Earning Power* seseorang atau badan usaha pada saat tidak dapat berfungsi (bekerja). Dengan demikian tujuan dari tertanggung jika menutup asuransi yaitu untuk memperoleh rasa tenang dari resiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya dan untuk mendorong keberanian menjelaskan usaha yang lebih besar dengan resiko yang besar pula karena resiko yang lebih besar diambil oleh penanggung.**
2. **Meningkatkan efisiensi tertanggung yang memiliki resiko, karena dengan menutup asuransi tidak perlu melakukan pengamanan dan pengawasan secara khusus untuk mengantisipasi resiko dan memberikan perlindungan yang mungkin akan memakan biaya tenaga dan waktu yang lebih banyak. Cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.**
3. **Jika menutup asuransi sejumlah uang (misalnya asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) asuransi menjadi sarana**

investasi yang dapat dipersamakan dengan menabung. Sebab, jumlah premi yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan kepada tertanggung dalam jumlah yang lebih besar.

4. Khusus bagi penanggung (perusahaan asuransi) memberikan atau menjual asuransi untuk meringankan resiko yang dihadapi oleh para nasabahnya atau para tertanggung dengan mengambil ahli resiko yang dihadapinya. Menciptakan rasa tentram dikalangan nasabahnya sehingga lebih berani menggiatkan usaha yang lebih besar. Mengumpulkan mengakumulasi dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun Dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang, bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan Negara.¹³

¹³ Tuti Rastuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, cetakan 1 , Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hal 6-8

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan akan menjelaskan tentang apa dan siapa yang menjadi objek penelitian. Sehingga yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 20 EE, Darat, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif merupakan :

Metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara *trigulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁴

Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*: Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 222

kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisnya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo :

“Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”.¹⁵

Dimana data langsung diperoleh secara langsung ke perusahaan melalui hasil wawancara yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo :

“Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan”.¹⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari objek penelitian yang meliputi sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan standar operasional perusahaan pada PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

¹⁵ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**, Edisi Pertama: BPFE, Yogyakarta, 2019, hal. 146

¹⁶ **Ibid**, hal. 147

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Indriantoro dan Supomo :

“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian”¹⁷

Wawancara dilakukan caara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait di perusahaan atau pejabat perusahaan dan karyawan perusahaan yang berwenang memberikan penjelasan mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti. Seperti wawancara dengan manajer keuangan, manajer akuntansi, dan karyawan-karyawan lainnya yang berhubungan dengan topik dan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Dokumentasi

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak:

“Metode ini merupakan suatu cara pengempulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan”.¹⁸

Dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan telaah data yang tersedia di tempat penelitian, yaitu pada bagian yang terkait dengan dokumen-dokumen Sistem Pengendalian Intern Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas di PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan.

¹⁷ **Ibid**, hal. 146

¹⁸ Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal.107

3.5 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif. Metode Analisis Deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkasifikasikan, atau menafsirkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran ataupun keterangan yang lengkap tentang Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas di PT. Jasa Raharja Perwakilan Medan.